

REVIVALISME ISLAM VERSUS NASIONALISME ARAB: MEMBANDING PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK SAYYID QUTHB - GAMAL ABDUL NASSER

Hamdan¹

¹Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: hamdanunasman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to track and find the point of equality and point of difference between the two Islamic political figures in Egypt. Sayyid Quthb is known as the Islamic Revivalism and Gamal Abdul Nasser as a national Arabic figure. The exploration is done through the library. The equation of these two figures is their movement appear as resistance (reaction) to Western Imperialism. The difference, through Islamic revivalism, Quthb wants the application of Islam as the basis or principles of politics life. While through Arab nationalism, Nasser more wishes the implementation of the principal of nationalism, and religion as an instrument to achieve the goal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menemukan titik persamaan dan titik perbedaan antara dua tokoh politik Islam di Mesir. Sayyid Quthb yang dikenal sebagai tokoh Revivalisme Islam dan Gamal Abdul Nasser sebagai tokoh Nasionalisme Arab. Eksplorasi dilakukan melalui penelusuran pustaka. Persamaan dari kedua tokoh ini adalah gerakan mereka muncul sebagai perlawanan (reaksi) terhadap imperialisme Barat. Perbedaannya, melalui revivalisme Islam, Quthb menghendaki penerapan Islam sebagai dasar atau azas kehidupan berpolitik. Sementara melalui Nasionalisme Arab, Nasser lebih menghendaki penerapan azas nasionalisme, dan agama sebagai instrumen untuk mencapai tujuan.

Keywords: *Revivalisme Islam, Sayyid Quthb, Nasionalisme Arab, Gamal Abdul Nasser.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah), setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan semacam skema kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa sejatinya karakter masyarakat yang mesti dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi. Sehingga, klasifikasinya tentang nilai baik dan nilai buruk harus menjadi kriteria serta landasan etis-moral dalam pengembangan seluruh aspek kehidupan.

Karena itu, pembumian nilai-nilai Islam merupakan tuntutan terhadap setiap pribadi muslim. H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, yang dikutip oleh M. Amin Rais melalui bukunya *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, menyatakan bahwa Islam bukan hanya a system of theology, tetapi lebih dari itu merupakan a complete civilization. Dalam nada serupa, Nasir juga mengkonfirmasi bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan (Amin Rais, 1997: 50-55), termasuk di antaranya dimensi politik.

Sayyid Quthb (selanjutnya ditulis Quthb) merupakan salah satu tokoh politik Islam yang sangat konseren dengan pergerakan Islam dan memiliki pengaruh cukup luas di dunia Islam. Sebagai tokoh politik Islam dan aktivis pergerakan Islam, Quthb sangat populer dan popularitasnya bahkan dapat menyamai pendahulunya; Hasan al-Banna, pendiri gerakan al-Ikhwan al-Muslimin (selanjutnya ditulis IM). Quthb disebut-sebut sebagai tokoh ideologi gerakan IM, karena berperan besar dalam memformulasi ideologi (fikrah) gerakan IM dan mensosialisasikan dalam gerakan-gerakannya (Amin Rais, 1997: 197).

Sejak bergabung dengan IM pada tahun 1953, Quthb berperan besar dalam mengembangkan dan memajukan IM. Ia mencoba memperjelas dan mempertegas tujuan dan cita-cita IM ke arah terwujudnya system Islam. Dalam setiap kesempatan, Quthb selalu mengajak kaum muslim melawan semua system yang disebutnya jahiliyah, baik yang ada di negeri-negeri Islam maupun negeri-negeri lain. selanjutnya digantikan dengan fikrah atau system Islam, tak terkecuali juga dalam bidang politik. Untuk mewujudkan cita-cita ini, tentu saja Quthb harus berhadapan dengan konspirasi-konspirasi penguasa dari Negara luar dan di dalam negaranya sendiri, yang tidak menghendaki system Islam tegak. Berkali-kali Quthb disiksa dan dijebloskan dalam penjara sampai akhirnya dieksekusi di tiang gantungan rezim penguasa Mesir tahun 1996 (A. Ilyas Ismail, 2006: 17-18).

Dengan gambaran sepak terjang seperti itu, tak dapat disangkal lagi eksistensi Sayyid Quthb sebagai salah seorang pemikir dan aktivis politik

Islam. Sebagai politikus Islam, Quthb memperlihatkan komitmennya yang tinggi terhadap perjuangan dan semangat menegakkan politik Islam, yakni semangat untuk mewujudkan system Islam, baik pada tataran individu maupun sosial budaya.

Menurut Quthb, masyarakat dunia kontemporer dihadapkan dengan dua pilihan konsep politik, yakni; *system jahiliyah* dan *system Islam*. Konsep pertama merupakan produk masyarakat sekuler dan konsep kedua merupakan produk agama. Kedua pilihan konsep ini sangat jelas perbedaannya, dan kemudian menjadi polemik di kalangan cendekiawan muslim ketika pilihan ini diberikan oleh Negara adikuasa yang memimpin dunia (A. Ilyas Ismail, 2006: 68-69).

Setidaknya, sejak kurun waktu abad ke-13 sampai ke-19, dunia Islam terseok-seok dan takluk dalam menghadapi agresi Eropa dalam segala aspek. Dunia Islam menjadi lemah antara lain karena perebutan kekuasaan dalam internal Islam sendiri. Peradaban Barat dengan segala kemajuannya, setelah berusaha membebaskan diri dari "cengkraman agama" (gereja), menjadi sangat bangga dengan kesuksesan yang diraihinya sebagai sebuah keberhasilan sekularisasi. Melalui atau atas nama kemajuan peradaban itulah, model serta system dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sebagainya, ditawarkan—jika tidak ingin disebut didesakkan—ke Negara-negara lain di seuruh dunia termasuk ke negara-negara Timur Tengah yang berpenduduk muslim. Bagi Negara-negara mayoritas muslim tersebut, pilihannya hanya dua; menyokong sebagai kawan atau menentang sebagai lawan?

Awal abad ke-20, umat Islam, setelah sadar akan ketertinggalannya dari dunia Barat, mencoba untuk bangkit kembali. Kebangkitan Islam ini dipelopori oleh cendekiawan-cendekiawan terkemuka di berbagai Negara muslim, dengan melakukan berbagai gerakan (sosial, politik dan budaya) melalui organisasi-organisasi gerakannya masing-masing.

Di Timur Tengah, telah muncul tiga bentuk nasionalisme pribumi sebagai identitas pengganti yakni; Turki, Iran, dan Arab/Mesir. Para reformis nasionalisme Turki Liberal yang dipimpin oleh Ahmad Reza memberi jalan pertama bagi Pan-Turkisme dari gerakan Turki Muda dan bagi nasionalisme Turki sekuler Attaturk, yang segera mendapat tantangan dari kalangan revivalis Islam. Di Iran, nasionalisme pribumi Persia berkembang menjadi ideologi Pan-Iran di bawah pimpinan Syah Reza yang di dasarkan pada masa lalu bangsa Aria pra-Islam, dan kemudian dihancurkan oleh Revolusi Iran tahun 1979 serta berdirinya sebuah Negara Islam. Di lingkungan Arab, nasionalisme Arab dan Mesir berkembang secara terpisah sampai tahun 1950-an ketika Gamal Abudul Nasser memimpin sebuah gerakan Pan-Arabisme.

Kekalahan Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967 dan kematian Nasser, membuat bangunan Pan-Arabise mulai runtuh. Bangsa-bangsa Arab mulai mundur dan mengarah pada isu-isu revivalisme Islam (R. Hrair Dekmejian, 2001: 8-10).

Para ideolog revivalis Islam kontemporer yang terkemuka misalnya; Hasan al-Banna, Abu A'la al-Maududi, Sayyid Quthb, Ruhullah Khumaini, Muhammad Baqir al-Sadr, Abd al-Salam Faraq, dan Juhaiman al-Utaibi. Pandangan-pandangan mereka cukup beragam, namun mereka secara substansial sepakat dengan prinsip pokok tertentu, yang dapat menggambarkan kerangka ideologi secara umum dari gerakan revivalisme Islam Kontemporer (R. Hrair Dekmejian, 2001: 13).

Menarik kiranya untuk membahas pemikiran politik dari Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser yang keduanya merupakan tokoh Islam berpengaruh di Mesir dan bahkan berpengaruh ke sejumlah Negara muslim di belahan dunia, meskipun orientasi perjuangan kedua tokoh ini saling berbeda.

PEMBAHASAN

Biografi Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser

Riwayat Sayyid Quthb

Mama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syudzili, lahir pada 09 Oktober 1906 di Desa Musya, dekat Kota Asyut, Mesir Atas, sebagai anak sulung. Ia memiliki tiga saudari perempuan dan satu saudara laki-laki. Ayahnya, al-Hajj Quthb Ibrahim, adalah anggota *al-Hizb al-Watani* (Partai Nasionalis) pimpinan Musthafa Kamil dan berlangganan surat kabar partai tersebut, *al-Liwa'*. Meski keadaan keuangan keluarga Quthb sodang menurun pada saat Iahir, keluarga ini tetap berwibawa berkat status ayahnya yang berpendidikan (John L. Esposito, 2002: 69).

Disebutkan bahwa pada usia 10 tahun, Quthb sudah menghafal seluruh isi al-qur'an. Meski sedang mengikuti *khuttab* (sekolah agama) di Desanya, dia segera pindah ke sekolah pemerintah dan lulus pada tahun 1918. Setelah itu Quthb pindah ke pinggiran kota Mesir, yakni kota al-Hulwan dan tinggal bertama pamannya yang berprofesi sebagai jurnalis. Ia mengikuti pendidikan keguruan tahun 1925 dan lulus pada tahun 1928. Mengikuti kuliah secara informal di *Dar al-'Uluum* (Universitas Mesir Modern bermodel Barat) dan lulus sebagai sarjana pada tahun 1933 dengan gelar Sarjana Muda dalam bidang pendidikan. Sebagai pengakuan atas prestasinya, ia diangkat menjadi dosen di *Dar al-'Uluum*. Tetapi ia memperoleh nafkah pokoknya antara 1933 sampai 1951 sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan, dimana ia sempat

menjabat sebagai inspektur (pengawas) selama beberapa tahun (John L. Esposito, 2002: 69).

Sewaktu bekerja sebagai inspektur sekolah, Quthb mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan, selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya antara *Wilson's Teacher's College* di Washington, dan *Greeley College* di Colorado, serta *Stanford University* di California. Ia berkesempatan mengunjungi banyak kota di Amerika Serikat, dan sempat berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Hasil studi dan pengalaman luas inilah yang membuat wawasannya semakin luas menyangkut problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialism yang gersang atas nilai ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, Quthb semakin yakin bahwa Islam-lah yang sanggup menyelamatkan manusia dari cengkraman materialism akut (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997: 145).

Awalnya memang, Quthb termasuk seorang pengagum Barat beserta segala kemajuannya yang dapat ia ketahui. Namun setelah menyaksikan langsung dari dekat peradaban Barat, Quthb berbalik arah dan menjadi seorang yang melawan Barat dan berjuang untuk menawarkan Islam sebagai solusi bagi permasalahan sosial politik di Mesir. Menurut Yvonne Y. Haddad, ada dua hal yang menyebabkan Quthb beralih pemikiran. Pertama, ia melihat Barat membela dan mendukung berdirinya Negara Zionis Israel tahun 1948. Ini dianggapnya sebagai sebuah penolakan terhadap hak-hak bangsa Arab. Ketika berada di Washington dan California, Quthb melihat langsung bagaimana dukungan luas pemerintah dan pens Amerika terhadap Israel. Kedua, ia menyaksikan langsung kermgnya peradaban Barat dari nilai-nilai spiritual. Quthb melihat sendiri bagaimana orang-orang berdansa di gedung gereja (Yvone Y. Haddad, 1987: 70-73). Inilah yang membuatnya berubah dan dengan komitmen yang tinggi menjadikan Islam sebagai ideologi.

Al-Khalidi (Nama lengkapnya adalah; Abd al-Salah al-Khalidi, penulis kitab *Sayyid Quthb al-Syahid al-Hayy*, yang diterbitkan di Amman tahun 1981), menyebutkan bahwa perkenalan Quthb dengan John Houritz Dunn—seorang intelijen Inggris yang menetap di Amerika yang kemudian masuk agama Islam—semakin menyadarkan Quthb akan perjuangan Hasan al-Banna dan IM. Disebutkan oleh al-Khalidi, Dunn pernah menyodorkan berbagai dokumen tentang rencana-rencana Inggris dan Amerika di Mesir, khususnya sikap mereka terhadap IM sejak organisasi ini didirikan tahun 1928 hingga terbunuhnya Hasan al-Banna tahun 1949. Dokumen Dunn itu juga menyebutkan bahwa manakala Inggris angkat kaki dari Mesir, maka Amerikalah yang akan menggantikan kedudukan Inggris (Badarussyamsi, 2013: 171-172).

Sejak saat itulah terjadi perubahan pada diri Quthb untuk lebih mengabdikan sepenuh hidupnya pada perjuangan Islam, khususnya melalui organisasi IM. Hal ini pernah diakui oleh Quthb sendiri, sebagaimana dikutip Abdullah ‘Azzam, Quthb menyatakan; “Kini terungkaplah kebenaran itu, dan saya yakin bahwa organisasi ini (IM) berada di pihak yang benar, dan pasti tidak ada ampunan untuk saya di sisi Allah manakala saya tidak mengikutinya. Lihatlah Amerika ini, ia berusaha menindas Hasan al-Banna dan Inggris pun mengerahkan seluruh personil dan media propagandanya, bahkan di Amerika Serikat sekalipun, untuk memerangi IM. Karena itu saya tegaskan pada diri saya bahwa saya bergabung dengan IM saat saya belum lagi keluar dari rumah intelijen Inggris ini” (Badarussyamsi, 2013: 172).

Pada tahun 1953 (keterangan lain menyebutkan tahun 1951) setelah pulang dari Amerika, Quthb masuk bergabung dengan kelompok al-Ikhwan al-Muslimin, dan di sinilah ia mulai mengembangkan gagasan-gagasannya. Jika kita merujuk pada keterangan tahun di atas (1953) dan dikaitkan dengan keterangan paragraf sesudahnya yang sama bersumber dari John L. Esposito dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, menunjukkan bahwa keterlibatan Quthb dalam revolusi (1952) berlangsung sebelum Quthb bergabung dalam IM (1953). Artinya gerakan Quthb belum ada hubungannya dengan, atau tidak atas representasi organisasi IM. Keterangan ini berbeda dengan keterangan Abdullah ‘Azzam yang dikutip oleh Al-Khalidi bahwa tahun 1951 merupakan tahun dimana Quthb mulai mempersembahkan pengabdianya kepada IM, dalam rangka perjuangan Islam. Begitu bergairahnya Quthb sehingga ia menyebut tahun ini sebagai tahun ‘kelahiran’-nya. “Saya lahir tahun 1951”, katanya. Hal ini karena waktu 45 tahun sebelumnya ia anggap dirinya tidak pernah ada (Badarussyamsi, 2013: 173).

Selanjutnya, Quthb ditunjuk menjadi Penyunting pada surat kabar mingguannya, al-ikhwan al-muslimin, dan tak lama setelah itu ia menjadi Direktur Bagian *Propaganda*, lalu dipilih untuk mengabdikan pada badan tertingginya, Komite Kerja dan Dewan Pembimbing. Istilah “propaganda” yang digunakan John L. Esposito ini, berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Ensiklopedi Islam, yang disebut dengan istilah “dakwah”. Penggunaan kedua terminologi ini dapat menciptakan perbedaan persepsi para pembaca terhadap Sayyid Quthb dan IM. Terminologi “propaganda” lebih berkonotasi negatif yang identik dengan gerakan penghasutan dan pembusukan. Lebih negatif dari pada terminologi “dakwah”, yang lebih berkonotasi pada ajakan berpikir dan bertindak kritis atas dasar ajaran agama terhadap perkembangan sosial politik (John L. Esposito, 2002: 70).

Pada bulan Juli 1952, terjadi revolusi di Mesir yang menggulingkan kekuasaan monarki. Usaha-usaha kudeta mendapat dukungan kuat dari Sayyid Quthb. Disebutkan bahwa Quthb adalah juru kunci penghubung antara IM

dengan para pegiat kudeta. Sebagian dari pegiat kudeta, termasuk Gamal Abdul Nasser mengunjungi rumah Quthb sebelum melakukan kudeta. Bahkan Quthb merupakan orang sipil satu-satunya yang menghadiri rapat Dewan Komando Revolusioner (RCC) setelah perebutan kekuasaan terjadi. Quthb bersedia menjadi penasihat RCC untuk masalah budaya dan sampai mengepalai Pawai Pembebasan, sebuah organisasi mobilisasi massa yang disponsori oleh pemerintah (John L. Esposito, 2002: 70).

Revolusi Mesir tahun 1952 ternyata telah menempatkan Quthb pada posisi terhormat, di samping Muhammad Najib, Gamal Abdul Nasser dan lainnya. Pada Agustus 1952 atau beberapa hari setelah revolusi, para pemimpin revolusi meminta Quthb menyampaikan pidatonya di depan para prajurit di al-Zamalik. Diceritakan bahwa pemimpin tertinggi revolusi yakni Muhammad Najib akan menyambut sendiri kedatangan Quthb. Karena tidak bisa hadir, Najib mengiriskan sambutan tertulis lewat Anwar Sadat, dimana isinya antara lain memuji diri Quthb. Najib mengatakan, “Sayyid Quthb adalah Pencetus Revolusi (*ra'id al-tsaurat*), Pemimpin dari Para Pemimpinnya (*qa'id qadatih*) dan Ketua dari Ketua-ketuanya (*ra'is ru'asaih*). Pidato Quthb disambut dengan antusias yang tinggi oleh pendengarnya dimana di dalamnya ia menyatakan, “Sekarang revolusi betul-betul telah dimulai. Akan tetapi kita tidak boleh menyanjung-nyanjungnya, sebab dia belum memberikan sesuatu yang berarti. Diturunkannya Raja Fu'ad bukanlah tujuan revolusi ini, akan tetapi tujuannya adalah mengembalikan negeri ini kepada Islam” (Badarussyamsi, 2013: 173-174). Nampaknya revolusi 1952 merupakan momentum pertemuan antara Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser. Kedua tokoh ini bersama-sama berjuang menggulingkan rezim monarki Fu'ad.

Pasca revolusi, Quthb pernah menduduki posisi sebagai Penasihat Dewan Pimpinan Revolusi untuk urusan kebudayaan dan dalam negeri. Jabatan ini hanya dipangkunya selama beberapa bulan saja. Terdapat beberapa jabatan strategis yang pernah ditawarkan kepada Quthb namun ia tolak, yakni jabatan Menteri Pendidikan Mesir dan Direktur Umum Penerangan. Akhirnya Quthb setuju menerima jabatan Sekretaris Umum Liga Pembebasan (*hai'at al-tahrir*). Jabatan ini cukup strategis karena menyangkut penentuan kebijaksanaan politik Mesir. Jabatan ini dipegangnya selama beberapa bulan (Badarussyamsi, 2013: 174).

Revolusi mengantar Gamal Abdul Nasser ke tampuk kepemimpinan tertinggi Mesir. Tidak begitu lama, kedua tokoh ini menampakkan perbedaan. Nasser dipandang lebih membangun visi sosialis sekuler dan Quthb menginginkan Negara Islam. Gagasan-gagasan militan Quthb cukup kuat mempengaruhi kaum muda IM. Mereka menuntut berdirinya Negara Islam Mesir, dan karena tidak disetujui oleh Nasser, gerakan mereka semakin frontal menuntut presiden mundur, bahkan hingga melakukan percobaan pembunuhan

terhadap Nasser. Tetapi usaha itu gagal dan berakibat pada penangkapan sejumlah aktivis IM serta diadili. Ada yang dihukum gantung, ada yang dihuknm kerja paksa, dan ada yang dipenjarakan selama 15 tahun. Quthb termasuk salah seorang yang mendapat hukuman penjara (Muhammad Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210).

Setelah keluar dari penjara tahun 1964 atas permintaan presiden Irak Abdul Salam Arif, Quthb tetap aktif dalam IM dan menuangkan gagasannya melalui buku dan media massa. Namun masa bebasnya tidak lama, lalu ia ditahan kembali dengan tuduhan mengkoordinasi anggota IM untuk menggulingkan presiden Nasser dengan cara kekerasan. Akhirnya Quthb dikenakan hukuman mati pada 22 Agustus 1966 di Kairo (Muhammad Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210).

Riwayat Gamal Abdul Nasser

Gamal Abdul Nasser dilahirkan di Bany Mor 15 Januari 1918 dan meninggal 28 September 1970 di Kairo. Tanah lahinya ini tidak jauh dari tempat terjadinya peristiwa pemberontakan 1919 yang melibatkan penduduk Bany Mor melawan kolonial Inggris. Gencatan senjata antara Inggris dengan Mesir dan berakhirnya perang dunia I menjadi moment yang menandai kelahirannya. Masa pertumbuhan Nasser diwarnai dengan gencarnya perbincangan politik tersebut dan sedikit banyaknya membentuk kepribadian Nasser (Usman Jafar, 2012: 269).

Pendidikannya dimulai dari Madrasah Awwaliyah, Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, kemudian kuliah pada fakultas hukum (*kulliyat al-huquq*). Beberapa bulan kemudian ia pindah ke akademi militer dengan pertimbangan bahwa dengan jalan itulah ia dapat mewujudkan cita-citanya membebaskan Mesir dari kolonialisme dan imperialisme. Ketika lulus dan menjadi perwira, Nasser yang baru berusia 20 tahun, terpilih bersama Anwar Sadat dan perwira lainnya untuk mengikuti kursus lanjutan selama dua setengah bulan. Saat inilah Nasser dan teman-teman membantu organisasi rahasia yang bertujuan untuk mewujudkan ide nasionalisme Mesir. Setelah kursus, Nasser di kirim ke Sudan namun tetap berhubungan dengan organisasi tersebut. Sekembalinya dari Sudan, ia mengambil alih pimpinan organisasi menggantikan Sadat yang dipenjara. Pada saat inilah, Nasser menjalin hubungan baik dengan gerakan IM karena memiliki tujuan yang sama; mendirikan Negara Mesir merdeka (Usman Jafar, 2012: 270).

Selain itu pada tahun 1942, Nasser juga diangkat menjadi pengajar di Akademi Militer dan sekaligus diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memperoleh kenaikan pangkat Mayor setelah menyelesaikan pendidikan tersebut tahun 1948. Peristiwa perang Arab-Israel memberikan banyak inspirasi baginya untuk memperjuangkan

kepentingan Arab. Tahun 1949 ditetapkan sebagai pengajar pada sekolah administrasi pemerintahan. Dan tahun 1951 memperoleh kenaikan pangkat Letnan Kolonel (Usmaji Jafar, 2012: 271).

Setelah berubah menjadi negara Republik, Mesir dipimpin oleh seorang presiden. Muhammad Najib ditunjuk sebagai presiden yang pertama. Keberadaan Republik Mesir tidak terlepas dari peran Jenderal Muhammad Gamal Abdul Nasser, panglima militer pada saat itu. Tetapi ia “enggan” menjadi presiden karena banyak pertimbangan. Tatkala pemerintahan Najib mengalami hambatan keamanan, Najib dianggap tidak mampu. Lalu digantikan secara paksa oleh Gamal Abdul Nasser sebagai Presiden Republik Mesir kedua. Sejak memerintah negara tersebut, banyak pembaruan yang ia lakukan, beberapa di antaranya terkait dengan masalah pertahanan, keamanan, sosial, politik, dan ekonomi, baik menyangkut masalah dalam negeri maupun terkait dengan dunia luar. Banyak karya besar yang telah diukirnya, terutama di bidang ekonomi dan politik, misalnya ia menyebut negaranya dengan nama *al-Jumhuriyyat al-Arabiyyah* atau Republik Persatuan Arab (RPA), ikut menggagas terwujudnya Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan merancang sistem ekonomi Sosialis Islam, menggerakkan perang Arab-Israil tahun 1967 (Muhammad Nurudin, 2015: 57-58).

Para tokoh Mesir modern terutama Nasser, umumnya terinspirasi oleh kebesaran yang telah dicapai para pendahulunya. Sejak bangsa Mesir Kuno seperti Kaisar Pharaoh (Ramsec Akbar) hingga pemerintahan Islam terutama dinasti Fatimiyah yang sempat menggemparkan dunia. Oleh karenanya di zaman modern mereka hendak bangkit menjadi sebuah negara modern yang menjadi pusat budaya Islam dan kekuatan politik Timur Tengah. Untuk itu mereka menggelorakan ide nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai cikal bakal dalam mewujudkan cita-cita luhur yaitu meraih kembali kebesaran Mesir di zaman modern (Muhammad Nurudin, 2015: 58).

Pemikiran Politik Sayyid Quthb

Para pemikir politik Islam dalam periode pembaharuan dapat diklasifikasi dalam tiga varian besar. *Pertama*, kelompok konservatif dengan ciri yang menonjol adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran Islam bahwa; Islam adalah agama yang sempurna, lengkap, komprehensif, dan berlaku universal untuk seluruh ummat manusia. Varian ini diwakili oleh sejumlah tokoh seperti Sayyid Quthb, Hasan al-Banna, Hasan al-Turabi, dan Abu A'la a-Maududi. *Kedua*, kelompok modernis yang mengupayakan reformasi dalam rangka menemukan kembali rasionalisme, saintisme dan progresivisme dalam Islam. Varian ini diwakili oleh tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. *Ketiga*, kelompok liberal yang ingin melihat perubahan dalam pola berfikir umat Islam yang dianggap

stagnan, dengan mengedepankan semangat rekonstruksi pemikiran Islam yang telah mapan. Varian ini diwakili oleh tokoh seperti 'Ali 'Abd al-Raziq dan Thaha Husein (Munawir Sjadzali, 1990: 19).

Sayyid Quthb menyatakan bahwa segala permasalahan kehidupan umat manusia telah diatur dalam Islam, termasuk masalah politik kctatanegaraan. Sebagai konsepsi poitik, Islam memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki ideologi-ideologi lain di seluruh jagad dunia ini. Sayyid Quthb mengemukakan seidaknya ada tujuh karakter politik Islam (Muhammad Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210), yakni;

- a. *Rabbaniyah* (ketuhanan); merupakan konsep utama yang menjadi sumber bagi karakteristik lainnya. Islam bersumber dari al-qur'an yang beraaal dari Allah. Sebagai ajaran dari Allah, manusia hanyalah menerima, memahami, beradaptasi dengannya dan menerapkan dalam kehidupan. Ia tidak boleh dicampur baur dengan konsep-konsep menurut kemauan manusia.
- b. *Konstan*; yakni dalam Islam terdapat nilai-milai universal yang bersifat konstan, tidak boleh diubah-ubah. Ia tidak berkembang dengan berkembangnya realitas kehidupan manusia. Nilai ini adalah kebutuhan manusia yang diperlukan untuk mengendalikan gerak kemanusiaan dan perkembangan kehidupan manusia, sehingga mereka tidak tersesat.
- c. *Konfrehensif* dan *universal*; karena Islam berasal dari Allah maka ia terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, kelalaian dan kontradiksi. Islam tidak hanya mementingkan persoalan duniawi tapi juga ukhrawi.
- d. *Keseimbangan*; bahwa ada doktrin Islam yang dapat dipahami dan ada yang tak dapat dipahami. Sebuah akidah yang tidak mengandung hakekat yang lebih besar dari yang sanggup diketahui manusia, bukanlah akidah. Keseimbangan ini juga terlihat pada kehendak mutlak Tuhan dan kehendak relative manusia. Hal ini meniscayakan pertanggungjawaban perbuatan manusia di hadapan Tuhan.
- e. *Keaktifan*; Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersifat aktif dalam kehidupan dunia. Manusia sebagai khalifah harus kreatif melakukan kerja-kerja progresif untuk menciptakan kemajuan dalam kehidupannya,
- f. *Realistis*; Islam berpijak pada hal-hal yang realistis dan tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia.
- g. *Tawhid*, merupakan doktrin universal yang dibawa oleh setiap rasul Tuhan. Doktrin ini mengajarkan bahwa Islam hanya menerima Allah sebagai sumber segala pengarahan dan syariat, system kehidupan dan tatanan sosial.

Berdasarkan karakter tersebut, sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali, Quthb mengemukakan tiga pokok pikirannya tentang Negara atau

pemerintahan Islam yang ia uraikan dalam buku karyanya *al-Adalah al-Ijtima'iyat fi al-Islam* (Munawir Sjadzali, 1990: 149-151). Ketiga pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pemerintahan supranasional

Negara atau pemerintahan Islam menurut Quthb adalah supranasional, meskipun ia menolak menggunakan istilah imperium. Wilayah Negara meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, yang dikelola atas prinsip persamaan penuh antara sesama umat Islam yang terdapat di seluruh penjuru dunia Islam, tanpa adanya fanatisme ras dan kedaerahan serta agama. Wilayah-wilayah di luar pusat pemerintahan tidak diperlakukan sebagai daerah-daerah jajahan, dan tidak pula dieksploitasi untuk kepentingan pusat. Karenanya, pendapatan daerah lebih diutamakan untuk kepentingan daerah, dan sisanya (jika ada) disetor ke *Bait al-Mal* atau perbendaharaan pemerintah pusat sebagai milik bersama dan dimanfaatkan bagi kepentingan bersama.

2. Persamaan hak antar pemeluk agama

Bahwa negara Islam menjamin hak-hak bagi orang *zimmi* dan kaum musyrikin yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan jaminan itu harus ditegakkan berdasarkan atas asas kemanusiaan tanpa perbedaan antar pemeluk agama. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemeluk agama, dan memberikan jaminan persamaan yang mutlak dan sempurna kepada masyarakat, dan bertujuan merealisasi kesatuan kemanusiaan dalam bidang peribadatan dan system kemasyarakatan

3. Tiga asas politik Islam

Menurut Quthb, politik pemerintahan Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Seorang penguasa harus adil secara mutlak, keputusan dan kebijakannya tidak terpengaruh oleh perasaan senang atau benci, suka tidak suka, hubungan kerabat, suku, dan hubungan khusus lainnya.

Ketaatan rakyat merupakan manifestasi dari kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab taat kepada penguasa bukan karena jabatannya, tetapi karena mereka menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Quthb menegaskan bahwa seorang penguasa Islam sama sekali tidak memiliki kekuasaan yang diterima dari langit. Dia semata-mata karena dipilih oleh umat berdasarkan hak dan kebebasan mereka yang mutlak. Ini berarti bila umat sudah tidak menghendaknya, maka kekuasaan tidak lagi berada di tangannya. Lebih lanjut Quthb menegaskan bahwa pemerintahan Islam tidak harus dibentuk atas suatu sistem atau pola tertentu. Pemerintahan Islam dapat menganut sistem mana pun asalkan melaksanakan syariat Islam. Sebaliknya,

pemerintahan yang tidak mengakui syariat Islam, meski dilaksanakan oleh organisasi berlabel Islam, tetap tidak dapat disebut pemerintahan Islam.

Permusyawaratan merupakan salah satu prinsip pemerintahan Islam, sedangkan teknis pelaksanaannya tidak secara khusus ditetapkan. Dengan demikian, bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya terserah kepada kepentingan dan kebutuhan. Islam memberikan ruang gerak yang luas dalam menentukan hukum bagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yang hukumnya tidak tercantum dalam dua sumber hukum. Karena itu, penguasa Islam mempunyai hak untuk melakukan pembaharuan hukum sesuai problema yang dihadapinya.

Pemikiran Politik Gamal Abdul Nasser

Gerakan yang dilakukan Nasser lebih berlandaskan pada gagasan-gagasan pembebasan kawasan dan orang-orang Arab dari dominasi Eropa, transformasi sosial masyarakat Arab, kontrol masyarakat terhadap penghasilan, serta demokrasi bagi rakyat dalam mencari dan memperoleh pendapatannya. Sehingga gerakan Nasser lebih dikenal dengan istilah nasionalisme Arab. Meskipun ia seorang muslim tetapi Islam tidak menjadi landasan utama dari gagasannya. Perbedaannya sangat jelas yakni Nasser memperjuangkan orang-orang Arab dan bukan kepentingan umat Islam yang hidup dalam kawasan dunia Arab. Islam cenderung digunakan sebagai alat perjuangan untuk memperoleh dukungan-dukungan dari umat Islam (Usman Jafar, 2012: 272-273).

Dalam Piagam 1962, Nasser mengajukan garis besar perjuangan masa depan Mesir. Gagasannya sangat dipengaruhi oleh prinsip Marxisme yang kemudian dipegang secara luas. Dalam piagam itu agama hampir tidak tercantum. Islam hanya sekali disebut sebagai penentu sejarah perkembangan pemikiran dan spiritual Mesir. Akan tetapi Nasser bukanlah seorang atheis seperti Lenin atau sekuler seperti Attaturk. Dia menghargai Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan Mesir yang harus disertakan untuk melanjutkan tujuan revolusi sosialis. Tidak ada usul-usulnya yang bertentangan dengan prinsip agama yang dianutnya secara teguh itu. Namun demikian Nasser tidak mau prinsip ini menghambat perkembangan masyarakat yang progresif dan menjadi modern. Nilai-nilai Islam harus digunakan secara positif untuk memperkuat keabsahan sistem politik Negara (John L. Esposito, 2002: 160).

Piagam ini menggaris-bawahi “nilai-nilai moral dari agama-agama yang kekal”, tetapi bukan Islam semata; “semua agama mengandung pesan kemajuan. Inti dari semua agama adalah membela hak manusia untuk hidup dan merdeka”. Para pemimpin agama di Universitas Al-Azhar lebih jauh menegaskan bahwa tujuan Islam dan sosialisme itu sama persis, yakni

pencapaian keadilan sosial, kesetaraan, kebebasan dan martabat, serta penghapusan kemiskinan. Universitas Al-Azhar menjadi organ propaganda Negara dan Nasser sendiri menggunakan mimbar masjid sebagai sarana bagi penancangan kebijakannya (John L. Esposito, 2002: 160-161).

Dalam bukunya *Philosofi of Revolution*, Nasser menjelaskan bahwa Nasionalisme Arab (Pan Arabisme) adalah persatuan bangsa Arab dalam menghadapi bangsa asing dan Israil, dalam satu persamaan senasib akibat penjajahan, persamaan agama, persamaan cultural, persamaan bahasa, yaitu bahasa Arab (John Obert Voll, 1997: 5).

Pertatuan bangsa Arab muncul dari ide nasionalisme (kebangsaan) Mesir, yaitu suatu perasaan senasib sebagai bangsa Mesir. Ide Nasser tersebut dimulai setelah terjadi revolusi Mesir, tanggal 23 Juli 1952 penggulingan atas penguasa zalim Raja Faruq. Setelah menggulingkan penguasa kerajaan, Nasser melakukan perubahan Undang-Undang (Konstitusi Mesir) tahun 1956. Isinya sangat kontroversial, yang mengubah konstitusi Islam menjadi sekuler, Kemudian ia mengubah UU Pendidikan terutama dengan merubah kurikulum Al-Azhar, Perguruan Tinggi Islam pertama dengan memasukkan mata kuliah umum di perguruan tinggi tersebut, karena semula tidak ada. Nasser juga memberlakukan UU Pokok Agraria (UUPA), sebuah peraturan yang menyangkut hajad hidup masyarakat banyak, mengingat mayoritas orang Mesir adalah petani. Sementara kebanyakan tanah-tanah di sana dimiliki para tuan tanah. Untuk itu ia bermaksud membatasi kepemilikan para tuan tanah. Dalam salah satu ketetapanannya bahwa para tuan tanah hanya dibatasi sampai 200 *fiddain* atau 209,400 m² (M. Riza Syihbudi, dkk, 1993: 91).

Pada tahun 1956 dia melakukan nasionalisasi Terusan Suez dari tangan penjajah Inggris. Dengan nasionalisasi tersebut menyebabkan perdagangan Asia-Eropa terhambat karena harus membayar retribusi terhadap pemerintah Mesir. Apalagi segala sesuatu yang bersifat rahasia sulit ditembus, mraaka pihak penjajah merasa rugi. Dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi perang antara Nasser dengan penjajah Israil. Nasser menderita kekalahan sehingga mempersulit gerakannya. Namun demikian dengan kegigihannya Nasser tetap mengambil keputusan di pihak rakyat. Sikap inilah yang menambah harum namanya dan bangsanya, terutama di mata bangsa Arab (Zikwan, 1997: 11).

Kegagalan Naser mewujudkan cita-citanya karena banyak faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, sikapnya yang ambisius dianggap sebagai bagian dari kepentingan pribadinya bukan representasi bangsa Mesir secara umum. *Kedua*, pertentangan dengan kelompok tradisional Islam belum cair seratus persen. bahkan ia dianggap menelikungnya. Oleh karenanya gerakannya selalu mendapat rintangan dari dalam negeri. *Ketiga*, dari Saudi Arabia, penguasa

tanah suci Mekkah dan Madinah merasa terusik dengan ekspansi Nasser di wilayah Arab. Oleh karenanya Raja Faisal, penguasa waktu itu merasa terusik. Dia berkolusi dengan Syekh Iran memelopori konferensi Umat Islam. Pada tahun 1965 konferensi itu menghasilkan munculnya gagasan ideologisasi Islam. Tidak berhenti di situ, Saudi juga memotori berbagai even dan gerakan kebudayaan Islam dengan biaya yang cukup. Bahkan pada tahun 1969 berdirilah Organisasi Konferensi Islam yang lebih dikenal dengan sebutan OKI (Muhammad Nurudin, 2015: 58).

Meski demikian, pengaruh pemikiran Nasser begitu kuat mempengaruhi dunia Islam. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya sebuah arus pemikiran baru yang dinamakan Nasserisme, yang berpihak pada pembebasan Arab dan seluruh Negara Afro-Asia yang dijajah atau didominasi oleh kekuatan Barat. Ideologi Nasserisme memperoleh darah segar dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 (John L. Esposito, 2002: 161-162).

KESIMPULAN

Dari uraian yang singkat tentang Pemikiran Politik Sayyed Quthb dan Gamal Abdul Nasser di atas, dapat diimpulkan sebagai berikut;

1. Sayyod Quthb maupun Nasser, meski tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda (akademik dan militer), keduanya memperoleh pengaruh besar atas kondisi kuatnya Imperialisme Barat ke wilayah-wilayah Arab dan Islam, serta kekuasaan monarki pemerintahan Mesir saat itu.
2. Sayyed Quthb dan Nasser menjadi berbeda terkait dengan soal; bagaimana dan seperti apakah bentuk Negara di Mesir. Quthb menawarkan konsep Islam satu-satunya sebagai dasar dalam bernegara, sedangkan Nasser lebih menghendaki Mesir dibangun atas azas-azas nasionalisme.

SARAN-SARAN

Artikel ini tentunya terlalu singkat untuk menjelaskan banyak hal terkait pemikiran politik dari dua tokoh besar Sayyed Quthb dan Gamal Abdul nasser. Masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam untuk memperoleh gambaran konfrehensif tentang kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi atau penelitian lebih jauh. Kritik konstruktif bagi artikel ini penting untuk menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badarussyamsi. 2015. “Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam”. *Tajdid*, Vol. XIV, No. 1, Januari-Juni.
- Dekmejian, R. Hrair. 2001. “Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori dan Konsekuensi”, dalam Shireen T. Hunter, “The Politics of Islamic Revivalism Diversity and Unity”, diterjemahkan oleh: Ajat Sudrajat dengan judul; *Politik Kebangkitan Islam; Keragaman dan Kesatuan*. Cet. 1; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 4; Jakarta: Ihtiar Bam van Hoeve.
- Esposito, John L. 2002. “The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World”, diterjemahkan oleh Eva YN, dkk., dengan judul; *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid 4, Cet. 2; Bandung: Mizan.
- Haddad, Yvone Y., dalam John L, Esposito (editor), diterjemahkan oleh Bakri Siregar. 1987. *Sayyid Quthb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam*. Cet 1; Jakarta: Rajawali Pres.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husai Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi I, Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. Ilyas. 2006. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*. Cet 1; Jakarta: Penamadani.
- Nurudin. Muhammad. 2015. “Pemikiran Nasionalisme Arab Gamal Abden Nasser dan Implikasinya terhadap Persatuan Umat Islam di Mesir”. *Addin*, Vol 9, No. 1, Febraari.
- Rais, M. Amin. 1997. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Cet. 1; Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. 1; Jakarta: UI Press.
- Syihbudi, M. Riza, dkk. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Cet 1; Bandung: Eresco.
- Voll, John Obert, diterjemahkan oleh: Ajad Sudrajad. 1997. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Cet 1; Yogyakarta. Titian Ilahi Press.
- Zikwan. 1997. *Konsep Sosialisme Arab, Kajian Pemikiran Qamal Abdun Nasser*. Cet 1; Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

